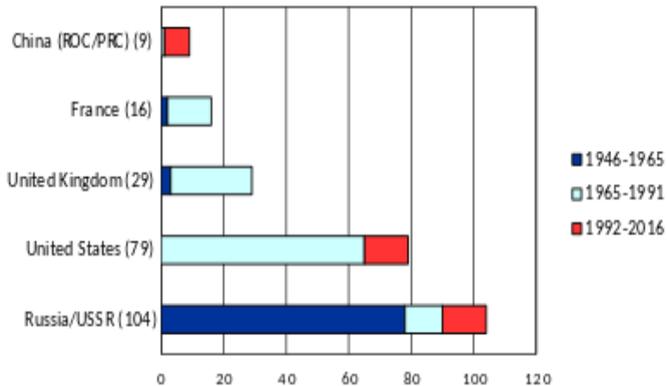


## BAB IV

### AKTUALISASI KARAKTERISTIK ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA DALAM KONFLIK KRIMEA

Dewan Keamanan merupakan sebuah badan vital yang sering berbenturan langsung untuk menyelesaikan sebuah konflik internasional. Dalam pelaksanaannya Dewan Keamanan tidak pernah terlepas dari sebuah dinamika untuk menyelesaikan sebuah konflik. Perilaku suatu negara sangat berpengaruh dalam perumusan kebijakan yang nantinya akan memberikan manfaat ketika resolusi tersebut dilaksanakan. Berikut berupa tabel kalkulasi yang menjelaskan sejarah panjang penggunaan hak veto dari kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

***Tabel 4.1 penggunaan hak veto anggota tetap  
Dewan Keamanan PBB (IPFS)***



Dalam sejarah Dewan Keamanan hampir setengah dari veto yang dihasilkan berasal Uni Soviet, dengan sebagian besar berada dilakukan sebelum tahun 1965. Sejak

tahun 1966 dari total 153 pemeran veto, 119 dikeluarkan oleh salah satu dari tiga anggota dewan yang merupakan anggota NATO: Amerika Serikat, Inggris dan Prancis. Dari tahun 1946 sampai 2016, veto dikeluarkan pada 236 kesempatan. Amerika Serikat telah menggunakan hak veto tersebut pada 79 kesempatan antara tahun 1946 dan 2016. Sejak tahun 1972, ia telah menggunakan hak veto lebih dari anggota tetap lainnya. Rusia atau Uni Soviet telah menggunakan hak veto tersebut dalam 103 kesempatan lebih banyak daripada lima anggota tetap Dewan Keamanan lainnya

Untuk mengetahui karakteristik anggota tetap Dewan Keamanan PBB, maka penulis akan memberikan beberapa penjelasan yang akan membantu guna memahami perilaku anggota tetap ketika menyelesaikan sebuah konflik Internasional.

## **1. Rusia**

Pada masa awal ketika berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa, komisaris Uni Soviet yang kemudian menjadi menteri untuk urusan luar negeri yakni Vyacheslav Molotov melakukan tindakan untuk memveto berbagai resolusi berkali-kali sehingga dia dikenal dengan julukan "Mr. Veto". Sebenarnya, Uni Soviet bertanggung jawab atas hampir separuh dari semua veto yang pernah dikeluarkan sebanyak 79 veto yang digunakan dalam 10 tahun pertama. Molotov secara teratur menolak tawaran keanggotaan baru karena penolakan Amerika Serikat untuk mengakui semua Republik Soviet. Sejak runtuhnya Uni Soviet pada akhir tahun 1989, Rusia menggunakan hak vetonya secara hemat hingga pada akhirnya digunakan

kembali pada konflik di tahun 2014 yaitu Ukraina dan Suriah.<sup>78</sup>

Keadaan terakhir untuk mengetahui posisi Rusia di Dewan Keamanan adalah dengan mengetahui kenyataan bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 Rusia telah melakukan abstain tahap awal pemberontakan di Libya ketika Dewan Keamanan memilih mendukung pembatasan impor peralatan militer oleh rezim Qaddafi dan pengenaan zona larangan terbang di atas wilayah konflik yang ditegakkan oleh pesawat NATO untuk mencegah tentara Libya agar tidak semakin meningkat dalam persenjataan untuk menekan pemberontakan tersebut melalui senjata api. Penolakan Rusia dan China untuk memaksakan pengekanan serupa atas Rezim Suriah pada tahun tersebut mengisyaratkan bahwa adanya pergeseran penting dalam pemikiran kebijakan luar negeri Rusia dan China. Hal tersebut dibuktikan juga dengan kondisi konflik pada saat itu yang semakin memanas seperti keadaan yang terjadi pada era perang dingin. Namun tanggapan dari Rusia adalah meminta semua pihak dalam konflik untuk menahan diri. Dalam prakteknya seolah-olah hanya menutup mata terhadap kebrutalan agen bersenjata yang jauh lebih baik dari pemerintah dalam menekan kaum oposisi. Menurut pandangan mereka resolusi yang diciptakan justru dianggap sebagai pemicu untuk intervensi eksternal.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>IPFS. 2017. *Analysis by Country : Rusia*. Dalam [https://ipfs.io/ipfs/QmXoyvizjW3WknFIJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/United\\_Nations\\_Security\\_Council\\_veto\\_power.html](https://ipfs.io/ipfs/QmXoyvizjW3WknFIJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/United_Nations_Security_Council_veto_power.html) diakses pada 2 Februari

<sup>79</sup> Turlin, Jean-Louis. 2011. *Russia's UN ambassador sums up the country's position*. Dalam [https://www.rbth.com/articles/2011/12/08/russias\\_un\\_ambassador\\_sums\\_up\\_the\\_countrys\\_positions\\_13923.html](https://www.rbth.com/articles/2011/12/08/russias_un_ambassador_sums_up_the_countrys_positions_13923.html) diakses pada 18 Februari 2018

Rusia memiliki kecurigaan bahwa suatu upaya pemerintah lain untuk mengeksploitasi suatu situasi untuk mempromosikan perubahan rezim. Dengan kata lain bahwa biarkan sebuah bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Rusia secara rutin memveto intervensi PBB dalam kasus semacam itu. Sementara Rusia tidak memilih, mereka sering abstain. Sebagai contoh kecil mereka menerima intervensi militer PBB di Pantai Gading pada tahun 2011 setelah sebuah pasukan kecil penjaga perdamaian PBB telah diserang oleh pasukan Presiden Gbagbo. Namun mereka sangat menentang invasi Amerika Serikat atau Inggris ke Irak pada tahun 2003, mereka tidak mencegah penggelaran misi PBB setelahnya untuk mencoba mengelola perdamaian. Jadi tindakan mereka tergantung pada “*cost and benefit*”.<sup>80</sup> Di satu sisi menurut Mankoff, Rusia berbagi keengganan kepada Amerika Serikat terhadap Iran yang bersenjata nuklir.<sup>81</sup> Di sisi lain, Rusia juga perlu bekerja sama dengan Iran di lingkup yang lebih luas terhadap isu regional.<sup>82</sup> Adapun kerjasama tersebut tetap dilanjutkan dengan Iran, khususnya kawasan Asia Tengah, termasuk Afghanistan untuk peningkatan perdagangan.

Namun, ada sebuah hal yang perlu diperhatikan. China telah memiliki tempat yang telah berbeda dengan China yang sebelumnya selama dua dekade terakhir. Dimana China secara bertahap meningkat kekuasaannya. Ada anggapan bahwa Rusia mewarisi kursi P5 dari Uni Soviet (FSU) yang sudah terbiasa diperlakukan sebagai

---

<sup>80</sup> Tsygankov, A.P. 2010. *Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity*, Rowman & Littlefield, Lanham, MD, 2nd ed. hal 184.

<sup>81</sup> Mankoff, J. 2009. *Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics*. Rowman & Littlefield, Lanham. MD. hal.121

<sup>82</sup> Kozhanov, R. 2012. *Russia's Relations with Iran: Dialogue Without Commitments*. Washington Institute for Near East Policy: Washington DC.hal 30.

negara adidaya yang menentang Amerika Serikat. Meski Presiden Yeltsin dan pemimpin Rusia lainnya berharap bahwa keunggulan ini akan terus berlanjut, mereka kecewa dengan turunnya status Rusia di dunia, meskipun sebagian disebabkan oleh jatuhnya ekonomi Rusia. Rusia menjadi kekuatan yang terlewatkan sehingga menjadi salah satu keprihatinan utama Presiden Putin adalah untuk mengembalikan kebanggaan dan pengaruh Rusia. Menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah elemen kunci dalam citra diri itu.

Menurut Orlov, *“For Russia today no world order is acceptable unless it can influence the taking of strategic decisions or be a member of the board of management”*<sup>83</sup>

Seperti yang dikatakan Gromyko, meski Rusia berpikir merasa dan bertindak pada dasarnya seperti kekuatan Eropa atau disebut dengan istilah “Europeaness”, namun itu tidak ada hubungannya dengan hubungan Rusia dengan Uni Eropa atau dengan negara bagian di sebelah barat perbatasannya. Karena ketika Rusia pergi ke Selatan atau Timur, membawa serta cara berpikir Eropa dan budaya Eropa menjadi salah satu sumbernya. Namun jika Rusia memodernisasi ambisinya dan mendengarkan suara yang mendesaknya untuk berubah menjadi negara Eropa biasa, dalam praktiknya Rusia akan secara sukarela menyerahkan statusnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.<sup>84</sup> Untuk tetap menjaga kekuasaannya dan wajah mereka di sebagai kekuatan dunia maka Rusia melakukan kerjasama dengan China yang notabene merupakan negara di Asia. Berbagai pandangan diatas dikatakan bahwa kebijakan luar negeri China mulai berevolusi secara bertahap ke arah kepercayaan diri dan ketegasan yang lebih besar, namun

---

<sup>83</sup> Orlov, D. 2006. *Politicheskaiia doktrina suverennoi demokratii in Suverennaia demokratiia: ot idei k doktrine*. Evropa: Moscow. hal 6.

<sup>84</sup> Gromyko, A.A. 2012. *Rossiia mezhdu Evropoi i Aziei’*. Mezhdunarodnaia Zhizn.

kebijakan luar negeri Rusia berjalan ke arah yang berlawanan, menuju ke pertahanan yang lebih besar.

Berdasarkan karakter politik Rusia maka pilihan yang diambil adalah tindakan veto terhadap resolusi Dewan Keamanan mengenai krisis di Ukraina. Keputusan tersebut didukung dengan beberapa alasan, diantaranya :

Pertama, Rusia ingin tetap survive di dunia internasional dengan menerapkan *self-help system*. *Self-help system* digunakan karena negara hanya dapat menolong atau menyelamatkan dirinya sendiri, baik melalui kekuatan nasionalnya maupun melalui persekutuan. Dalam hal ini Rusia survive agar kepentingannya dapat tetap tercapai. Faktor historis sangat mendukung dinamika tersebut ketika Rusia dihadapkan dengan lawan politiknya yaitu Amerika Serikat. Dalam pandangan kaum Neo-Realis dikarenakan sistem internasional bersifat anarki maka organisasi internasional hanya dijadikan sebagai alat bagi negara untuk berinteraksi di level internasional.

Adapun survive disini yakni untuk tetap menjaga kehormatan Rusia dari padangan internasional sebagai negara adidaya. Pemerintah Rusia tidak ingin dilihat lemah ketika disudutkan dengan suatu masalah dan mendapatkan kecaman dari dunia internasional atas tindakan yang diambil. Terdapat tiga interpretasi yang masuk akal atas langkah Putin untuk menyikapi kasus ini, yakni : *Putin as Defender*, *Putin as Imperialist*, dan *Putin as Improviser*.

Keamanan nasional merupakan elemen penting bagi sebuah negara agar dapat bertahan di era perkembangan berbagai negara melakukan peningkatan militernya. Untuk itu Operasi Krimea merupakan sebuah respons terhadap ancaman ekspansi NATO lebih jauh di sepanjang perbatasan barat Rusia. Dengan logika ini, Putin merebut semenanjung tersebut untuk mencegah dua kemungkinan berbahaya diantaranya bahwa pemerintah

baru Ukraina dapat bergabung dengan NATO dan kemungkinan bagi Kiev dapat mengusir Armada Laut Hitam Rusia dari basis lama di Sevastopol. Pangkalan tersebut merupakan zona strategis bagi Rusia sebagai markas militernya dengan jumlah personel kurang lebih sebanyak 15.000 pasukan. Kedua hal tersebut dihindari Putin agar tidak terjadi sehingga Rusia masih bisa mendapatkan legitimasi sebagai salah satu kiblat bagi negara-negara di dunia.

Upaya tersebut juga untuk meredam perluasan pengaruh NATO ke berbagai perbatasan dari Rusia yang masih dipengaruhi oleh ideologi dari Uni Soviet sebelum negara tersebut runtuh pada 1991. Hal itu juga merupakan proyek Rusia untuk secara bertahap merebut kembali bekas wilayah yang dulunya sempat menjadi bagian dari Uni Soviet. Putin tidak pernah menerima hilangnya prestise Rusia yang mengikuti berakhirnya Perang Dingin. Argumen ini menunjukkan bahwa ia bertekad untuk memulihkan kehormatan Rusia yang semakin lama terkikis oleh perkembangan negara lain, sebagian caranya adalah dengan memperluas perbatasan dari Rusia. Rusia juga mulai melakukan investasi besar dalam memodernisasi Armada Laut Hitam di Sevastopol, dengan tujuan mengubahnya menjadi kekuatan tempur modern yang mampu memproyeksikan kekuasaan ke seluruh Laut Hitam dan Laut Tengah.

Kedua adalah *Struggle for Power*, tindakan Rusia di Dewan Keamanan untuk mengambil jalan veto adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Ketika resolusi tersebut berhenti atau gagal untuk diadopsi, di saat yang sama itu memberikan kesempatan bagi Pemerintah Rusia untuk tetap mendominasi Ukraina. Hans J. Morgenthau yang dijadikan sebagai pemikir utama perspektif Realisme dalam bukunya yang termasyhur *The Politics Among Nations* menyatakan

bahwa “*international politics like all politics is struggle for power*”<sup>85</sup>

Menurut Waltz (1979) bentuk dasar hubungan internasional adalah struktur anarki yang tersebar di antara negara-negara. Isu utama yang dibahas dalam perspektif ini ialah masalah *military security, survival* serta berbagai macam isu yang termasuk ke dalam isu-isu *high politics*. Neorealisme memandang negara sebagai aktor utama yang rasional serta bersifat unitary. Negara juga diharuskan untuk memaksimalkan *power* nya serta negara dalam hubungan internasional hidup dalam sistem anarki, dimana tidak mengakui adanya supra-state.<sup>86</sup> Menurut Baldwin, adanya pandangan bahwa sistem internasional adalah anarki yang dimana struktur dunia dimana tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari suatu negara yang berdaulat. Kaum neoralis berpendapat bahwa struktur anarki akan menciptakan sebuah ancaman tersendiri bagi sebuah negara sehingga negara tersebut harus melakukan pertahanan agar keamanan negara nya tetap terjaga.<sup>87</sup>

Kerjasama Internasional menurut neorealisme, kerjasama antar negara memang mungkin terjadi tetapi kerjasama tersebut semata-mata dijalankan hanya untuk mencapai *national interest* nya dengan menggunakan *power* dari negara tersebut. Tujuan negara bagi neorealisme berorientasi pada hal keamanan negara

---

<sup>85</sup> Morgenthau, H.J. 1978. *Politics Among Nations: the struggle for power and peace*. Knopf. hal 31

<sup>86</sup> Fauziyah, Nur Inayati. 2014. *Neorealisme dan Neoliberalisme dalam Hubungan Internasional*. Dalam [http://nur-inayati-fisip13.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-96572-THI-Neorealisme%20dan%20Neoliberalisme%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html](http://nur-inayati-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-96572-THI-Neorealisme%20dan%20Neoliberalisme%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html) diakses pada 23 february 2018

<sup>87</sup> Keohane, Robert O. *Neorealism and its critics*. 1986. *Columbia University Press: New York*. Dalam <http://www.jstor.org/stable/2706934> Diakses pada 23 february 2018

sebagai sebuah tujuan yang sangat penting dan menganggap bahwa institusi dan rezim internasional tidak begitu penting.<sup>88</sup> Maka organisasi internasional seperti PBB tidak bisa untuk menghentikan laju sebuah negara dalam merumuskan kebijakannya.

Adapun beberapa hal yang masih ingin dikuasai oleh Rusia seperti aspek demografi. Jumlah penduduk Semenanjung Krimea saat ini adalah 2,2 juta orang, di antaranya hampir 1,5 juta orang Rusia, 350.000 adalah orang Ukraina yang secara dominan menganggap bahasa asli mereka dari bahasa Rusia, dan sekitar 290.000-300.000 adalah Tatar Krimea. Ada saat ketika Tatar Krimea diperlakukan tidak adil, sama seperti sejumlah orang lain di Uni Soviet. Hanya ada satu hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu jutaan orang dari berbagai etnis menderita selama masa represi tersebut, terutama orang Rusia. Pemerintah Rusia sangat menghormati orang-orang dari semua kelompok etnis yang tinggal di Krimea. Ini adalah rumah bersama mereka, tanah air mereka.

Tentu Rusia tidak bisa meninggalkan permohonan yang tidak dijalankan. Pemerintah Rusia tidak bisa meninggalkan Krimea dan penduduknya dalam kesusahan. Rusia harus membantu menciptakan kondisi sehingga penduduk Krimea untuk pertama kalinya dalam sejarah dapat dengan damai mengekspresikan kebebasan mereka berkenaan dengan masa depan mereka sendiri. Vladimir Putin memahami apa kekhawatiran warga Ukraina, baik Rusia dan Ukraina, dan penduduk berbahasa Rusia di wilayah timur dan selatan Ukraina. Oleh karena itu, jika kita melihat kejahatan yang tidak terkendali menyebar ke wilayah timur negara tersebut, lalu jika mereka meminta bantuan sementara sudah memiliki permintaan resmi dari

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

presiden yang sah, maka berhak menggunakan semua sarana yang ada untuk melindungi mereka.

Hal yang tidak luput dari perhatian Pemerintah Rusia yakni pertimbangan dari sektor ekonomi, namun lebih ke konflik “*Gas War*” yang akan melibatkan kedua negara bahkan memiliki dampak ke berbagai pihak. Rusia memulai untuk mematikan keran pasokan gas, setelah mengeluh bahwa Ukraina telah gagal melunasi hutangnya, yang diperkirakan mencapai USD 882miliar (£550miliar) oleh raksasa Gazprom milik negara Rusia. Ini bukan pertama kalinya Rusia memotong persediaan karena sengketa harga di tahun 2006 dan pada musim dingin 2008-09. Bahkan kedua pemerintahan telah duduk untuk menyelesaikan konflik ini dan mencoba untuk membangun sebuah kompromi namun tetap tidak berhasil. Sekitar seperlima pasokan gas alam Uni Eropa mengalir melalui Ukraina. Ukraina sendiri bahkan mengimpor dari Rusia sebesar 63 persen dari gas alam yang dikonsumsi pada tahun 2012, dimana menghasilkan 37 persen sisanya di dalam negeri. Sehingga pemerintah Rusia menginginkan jika Krimea menjadi wilayah dari Rusia, pasokan gas tidak harus melalui Ukraina terlebih dahulu namun bisa langsung dipasok dari Rusia. Beberapa alasan itu yang melatarbelakangi usaha Rusia untuk *struggle for power* yang ditunjukkan dengan tindakan veto terhadap resolusi.

Oleh sebab itu cita-cita untuk mengembalikan Rusia berjaya lagi seperti masih berbentuk Uni Soviet dituangkan oleh Vladimir Putin kedalam kebijakan untuk menganeksasi wilayah semenanjung Krimea. Kebijakan tersebut diikuti dengan tindakan veto oleh Rusia terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai status aneksasi Krimea yang dianggap ilegal.

## 2. Amerika Serikat

Duta Besar Charles W. Yost mengeluarkan hak veto dari Amerika Serikat yang pertama pada tahun 1970. Veto tersebut berkenaan dengan sebuah krisis di Rhodesia. Amerika Serikat juga memberikan sebuah hak veto tunggal pada tahun 1972 untuk menghalangi sebuah resolusi yang mengutuk Israel karena berperang dengan Suriah dan Lebanon. Sejak saat itu negara ini menjadi pengguna yang paling sering untuk menggunakan hak veto, terutama pada resolusi yang mengkritik dan mengutuk Israel dan hampir selalu secara sepihak untuk konflik perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Sejak tahun 2002, doktrin Negroponte telah diterapkan untuk penggunaan hak veto mengenai resolusi yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung. Hal ini menjadi penyebab konstan gesekan antara Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Pada tanggal 18 Februari 2011, pemerintahan Obama memveto resolusi yang mengancam permukiman Israel.<sup>89</sup>

Jika dilihat ke belakang dari tahun 1948 sampai akhir Perang Dingin, kebijakan luar negeri Amerika Serikat berorientasi pada prinsip yakni penahanan Uni Soviet dan penyebaran komunisme global. Pembuatan kebijakan yang didasari pada kepentingan bersama dan usaha kooperatif jarang menjadi pilihan bagi para pembuat kebijakan di Moskow dan Washington yang percaya bahwa mereka terkunci dalam persaingan “*zero-sum game*” dengan musuh mereka, di mana kerugian mereka pasti keuntungan bagi orang lain. Dengan kondisi seperti ini, Dewan Keamanan merasa frustrasi dengan veto berulang yang sebagian besar dilakukan oleh Uni Soviet. Sehingga Majelis Umum

---

<sup>89</sup>IPFS. 2017. *Analysis by Country : United States*. Dalam [https://ipfs.io/ipfs/QmXoypijW3WknFIJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/United\\_Nations\\_Security\\_Council\\_veto\\_power.html](https://ipfs.io/ipfs/QmXoypijW3WknFIJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/United_Nations_Security_Council_veto_power.html) diakses pada 2 Februari

menjadi medan pertempuran ideologis dan strategis. Berbagai pendapat muncul bahwa organisasi tersebut tidak dapat memainkan peran sentral dalam urusan politik dan keamanan yang telah dibayangkan oleh para pendiri sejak organisasi ini dirumuskan keberadaannya.<sup>90</sup>

Melengkapi ketidakterlibatannya Amerika Serikat dalam krisis regional sama sekali bukan pilihan kebijakan yang realistis untuk Amerika Serikat. Jangkauan politik, ekonomi, dan militer negara ini sekarang begitu besar sehingga warganya, perusahaan, diplomat, tentara, dan investasi hadir di seluruh dunia. Veto di Dewan Keamanan dan formula voting yang berbobot di lembaga keuangan internasional memberi pengaruh besar kepada Amerika Serikat mengenai bagaimana dan kapan PBB akan menanggapi situasi krisis, sehingga Amerika Serikat merasa bahwa memiliki peran penting di cakupan yang lebih luas untuk menjaga keseimbangan.

Amerika Serikat tidak bisa berdiri sendiri untuk menanggung beban menjadi polisi dunia. PBB menyediakan sarana untuk membuat negara lain berbagi biaya untuk kegiatan operasional, dengan Amerika Serikat membayar sekitar 25 persen dari anggaran reguler dan 30 persen biaya pemeliharaan perdamaian. Meskipun Amerika Serikat terus memainkan peran kepemimpinan di PBB, Amerika Serikat memiliki tunggakan sangat besar untuk membuat organisasi ini agar tetap berjalan. Meskipun para pengkritik yang menuntut PBB berusaha untuk mendikte kebijakan luar negeri Amerika Serikat, tetapi kebijakan yang berjalan dalam sistem PBB seringkali dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk memajukan kepentingan Amerika Serikat di luar negeri. Negara ini dapat

---

<sup>90</sup>C. Luck, Edward and Birnback, Nick. *For the Common Good: The U.S. Role in the United Nations*. Dalam <http://www.socialstudies.org/sites/default/files/publications/se/5807/580702.html> diakses pada 18 Februari 2018

menggunakan pengaruhnya dan hak veto di Dewan Keamanan untuk membimbing PBB dalam membangun koalisi internasional dan dalam memilih bagaimana dan kapan harus melakukan intervensi tanpa harus bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan mandat Dewan. Bertindak secara multilateral dan bertindak secara sepihak, akan tetapi sama sekali tidak saling membuat status negara menjadi eksklusif. Amerika Serikat dapat memilih untuk bertindak sendiri saat itu satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan nasionalnya.<sup>91</sup>

Untuk melindungi stabilitas keamanan dunia, Amerika Serikat sangat menentang tindakan aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Krimea. Sesuai dengan prinsip Amerika Serikat sendiri yakni untuk menghentikan penyebaran komunisme global. Meskipun Rusia bukanlah Uni Soviet, namun negara tersebut sudah pasti mewarisi beberapa ajaran nenek moyangnya. Persaingan kedua negara tersebut sudah tidak bisa dikesampingkan berdasarkan fakta sejarah yang telah terjadi. Perwakilan Amerika Serikat untuk PBB mengatakan bahwa siapa pun yang telah melihat perdebatannya di Dewan Keamanan PBB dengan Rusia tahu bahwa saya dan pemerintah telah lama memiliki masalah serius mengenai tindakan agresif dan tidak stabilnya pemerintah Rusia. Argumen yang disampaikan pada saat itu melampaui tindakan tertentu yang telah diambil Rusia terhadap strategi wilayah yang lebih luas, dan juga menjelaskan apa artinya keamanan bagi Amerika Serikat.

Beliau menjelaskan bagaimana Pemerintahan Rusia di bawah Presiden Putin mengambil langkah-langkah yang melemahkan tatanan peraturan dunia yang telah

---

<sup>91</sup> C. Luck, Edward and Birnback, Nick. *For the Common Good: The U.S. Role in the United Nations*. Dalam <http://www.socialstudies.org/sites/default/files/publications/se/5807/580702.html> diakses pada 18 Februari 2018

Amerika Serikat memanfaatkan selama tujuh dekade. Beberapa hal tersebut yakni nilai-nilai, keamanan, kemakmuran, dan cara hidup saat ini telah terikat dengan peraturan atau perintah tersebut. Oleh sebab itu Amerika Serikat dan mitra mereka selalu bekerja sama untuk membuat rencana Rusia tersebut tidak berhasil. Di bawah kepemimpinan Presiden Obama, Amerika Serikat telah menunjukkan komitmen untuk berinvestasi dan mematuhi peraturan internasional. Hal yang sama sekali tidak bisa untuk dilakukan oleh Pemerintah Rusia dalam kasus tersebut. Untuk beberapa tahun terakhir Pemerintah Rusia telah mengambil tindakan agresif dan membuat tatanan dunia tidak stabil. Bahkan beberapa tahun sebelumnya pemerintah Amerika Serikat menemukan fakta bahwa Rusia mendukung Bassar Al-Assad untuk berperang di Syria. Lalu pada konflik di Krimea, Pemerintah Rusia menurunkan tentaranya yang dijuluki "*The Little Green Man*".<sup>92</sup>

Untuk menindaklanjuti tindakan aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Krimea, Amerika Serikat melalui perwakilannya di PBB yakni Samantha Power mengajukan sebuah resolusi ketika Sidang Dewan Keamanan PBB digelar pada tahun 2014. Amerika Serikat mengambil sikap untuk menyetujui resolusi tersebut dan menganggap tindakan yang diambil oleh Rusia merupakan aksi yang ilegal. Resolusi tersebut berisikan tentang pemisahan diri Krimea dari Ukraina dinilai tidak memiliki validitas. Hal tersebut menegaskan tentang kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan dan kedaulatan teritorial Ukraina. Resolusi tersebut mendesak semua pihak

---

<sup>92</sup> Begley, Sarah. 2017. <http://time.com/4637117/samantha-power-united-nations-russia-speech-transcript/> diakses pada 18 februari 2018

untuk menahan diri dari tindakan sepihak dan retorika yang mungkin akan semakin memanas.<sup>93</sup>

### 3. Inggris

Inggris telah menggunakan hak veto Dewan Keamanannya dalam 32 kesempatan. Kejadian pertama adalah pada bulan Oktober 1956 ketika Inggris dan Prancis memveto sebuah surat dari Amerika Serikat kepada Presiden Dewan Keamanan mengenai Palestina. Adapun kejadian lainnya adalah pada bulan Desember 1989 ketika Inggris, Prancis dan Amerika Serikat memveto sebuah rancangan resolusi yang mengancam invasi Amerika Serikat ke Panama.<sup>94</sup>

Inggris menggunakan hak veto bersama dengan Prancis untuk memveto sebuah rancangan resolusi yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis Canal Terusan Suez pada tahun 1956. Inggris dan Prancis akhirnya mengundurkan diri setelah Amerika Serikat menghasut untuk membuat sebuah *'emergency special session'* Majelis Umum di bawah syarat resolusi *"Uniting for Peace"* yang menyebabkan terbentuknya United Nations Emergency Force I (UNEF I) dengan adopsi resolusi Majelis 1001.<sup>95</sup> Inggris juga menggunakan veto sebanyak tujuh kali sehubungan dengan Rhodesia dari tahun 1963 sampai 1973,

---

<sup>93</sup> Sengupta, Somini. 2014. *Russia Vetoes U.N. Resolution on Crimea*. Dalam

<https://www.nytimes.com/2014/03/16/world/europe/russia-vetoes-un-resolution-on-crimea.html> diakses pada 18 februari 2018

<sup>94</sup> IPFS. 2017. *Analysis by Country : United Kingdom*. Dalam [https://ipfs.io/ipfs/QmXoypijzjW3WknFIJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/United\\_Nations\\_Security\\_Council\\_veto\\_power.html](https://ipfs.io/ipfs/QmXoypijzjW3WknFIJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/United_Nations_Security_Council_veto_power.html) diakses pada 2 Februari

<sup>95</sup> UN. 1950. *Emergency Special Sessions*.

<http://www.un.org/ga/sessions/emergency.shtml> diakses pada 18 Februari 2018

lima dari kesempatan ini bersifat unilateral yang merupakan satu-satunya kesempatan di mana Inggris telah menggunakan hak veto secara sepihak.<sup>96</sup>

Di era saat ini sebagai satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan, Inggris memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Inggris memainkan peran kunci dalam penerapan resolusi pada situasi yang membingungkan, termasuk yang mewajibkan penggunaan kekerasan, dan juga memiliki hak veto tetap seperti anggota permanen yang lainnya. Inggris sangat terlibat dalam pemilihan Sekretaris Jenderal PBB. Proses pengangkatan melibatkan Dewan Keamanan untuk mengajukan satu calon Majelis Umum PBB untuk disahkan. Salah satu prioritas utama untuk Inggris adalah wanita, perdamaian dan keamanan. Pemerintah telah memulai sejumlah resolusi mengenai isu-isu seperti kekerasan seksual dan masuknya perempuan dalam proses perdamaian.

Inggris tidak hanya terlibat di dalam Dewan Keamanan. Ia juga memainkan peran aktif dalam kegiatan PBB di seluruh bagian. Sebagai kontributor utama dalam hal pembangunan, Inggris bekerja sama dengan PBB di New York untuk membuat formula mengenai strategi pembangunan dan juga dengan badan-badan PBB lainnya perihal program pembangunan yang berkelanjutan atau SDG's. Perdana Menteri Inggris baru-baru ini memimpin sebuah panel di PBB yang membahas agenda program perkembangan PBB. Inggris adalah anggota aktif *UN's Human Rights Council*, yang baru saja terpilih menjadi anggota Dewan. Dapat diartikan bahwa Inggris berkontribusi pada pengembangan hukum dan norma hak asasi manusia serta untuk melindungi hak asasi manusia

---

<sup>96</sup> Dag Hammarskjöld Library. 1996-2004. *Security Council - Veto List*. Dalam <http://research.un.org/en/docs/sc/quick/veto> diakses pada 18 Februari 2018

dalam situasi negara tertentu. Dalam semua pekerjaannya di PBB, Inggris sangat tertarik untuk memperjuangkan reformasi untuk mempromosikan efisiensi dan transparansi.<sup>97</sup>

Konflik Krimea yang semakin memanas ditanggapi langsung oleh perwakilan Inggris, Perdana Menteri Cameron berbicara dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Francois Hollande tentang krisis tersebut. Hasil perbincangan di Downing Street mengatakan bahwa mereka telah sepakat untuk berbicara dengan satu suara dan mengirim pesan yang jelas ke Rusia bahwa tindakannya di Ukraina sama sekali tidak dapat diterima. Meskipun pemerintah Inggris tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Rusia, namun mereka tidak menutup kerjasama perdagangan London-Moskow. Tetapi hal tersebut bisa dijadikan sanksi yang akan dijatuhkan oleh Inggris terhadap Rusia jika aneksasi tetap dilakukan. Tindakan yang diambil oleh Rusia pasti memiliki biaya dan konsekuensinya. Perdana Menteri Inggris menilai bahwa tindakan tersebut telah melanggar kedaulatan dan integritas teritorial negara lain.

Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan bahwa situasi yang dialami saat ini adalah situasi paling berbahaya yang dialami oleh Eropa di abad ke 21 dan perlu adanya dialog antar kedua negara yang berkonflik. Tindakan yang diambil Rusia sangat salah jika tetap dilakukan karena mendapat penolakan keras dari dunia internasional. Inggris yang di PBB sangat terfokus ke pembangunan ekonomi, justru lebih banyak mengambil tanggapan dan tindakan diluar dari Dewan Keamanan. Pemerintah Inggris mengatakan bahwa situasi ini dapat dengan mudah mengganggu stabilitas kerjasama G-8. Inggris dan anggota

---

<sup>97</sup> UNA-UK. *The UK's Work With The UN*. Dalam <https://www.una.org.uk/get-involved/learn-and-teach/uks-work-un> diakses pada 18 Februari 2018

G-8 lainnya menunda pertemuan yang seharusnya diadakan di Moscow dan membekukan aset bisnis dari Rusia sebagai bukti penolakan atas aneksasi yang dilakukan oleh Rusia.<sup>98</sup>

Dua tahun yang lalu pada tahun 2014 Presiden Putin menandatangani dekrit yang mengkonfirmasi aneksasi ilegal Krimea. Pada tahun 2016, Sekretaris Luar Negeri, Philip Hammond mengancam pelanggaran hukum internasional yang terus berlanjut di Rusia dan meminta Rusia untuk menghentikan tindakan ilegal dan mengembalikan Krimea ke Ukraina. Tanggapan tersebut diikuti dengan beberapa pernyataan keras terhadap aneksasi yang dilakukan. Rusia mencoba melegitimasi pendudukan ilegal Krimea dengan "perjanjian" sepihak untuk "menyerap" semenanjung Krimea yang pada kenyataannya itu adalah tanah yang diambil.

Kremlin telah mengadakan referendum tidak sah di Krimea. Yang disebut referendum pada saat itu adalah sebuah olok-olok demokrasi, berbaur bersama hanya dalam waktu dua minggu saja, pada titik bayonet Rusia dan tanpa pemantau independen internasional. Ini digunakan sebagai dalih yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencaplok Krimea, perubahan pertama dengan kekuatan ke perbatasan Eropa dalam beberapa dasawarsa. Dengan mencaplok tanah Ukraina, melanggar integritas teritorialnya, dan mengacaukan Ukraina timur, Rusia telah melanggar hukum internasional dan menantang peraturan berdasarkan tatanan internasional. Tindakan semacam itu sama sekali tidak dapat diterima. Itulah sebabnya Inggris berdiri teguh melawan perilaku berbahaya ini dan menanggapi dengan cara yang serius dan strategis yang ditunjukkan dengan sebuah tantangan yang menuntut, termasuk dengan mempertahankan sanksi terhadap Rusia.

---

<sup>98</sup> *Ukraine crisis: UK warns Russia over Crimean incursion*. 2014. Dalam <http://www.bbc.com/news/uk-politics-26415789> diakses pada 18 Februari 2018

Posisi Inggris sangat jelas bahwa tidak dan tidak akan pernah mengakui pengambilalihan ilegal Krimea oleh Rusia. Pemerintah Inggris juga tidak akan melupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut dan dialami oleh korban agresi Rusia yakni etnis minoritas Krimea, terutama komunitas Tatar Krimea dengan persentase yang cukup besar dan telah menanggung banyak pelanggaran yang seharusnya menjadi tanggung jawab Rusia. Keputusan baru-baru ini oleh pemerintah Rusia untuk mendaftarkan parlemen Krimea Tatar sebagai organisasi ekstremis adalah masalah serius. Semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penahanan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan berekspresi, agama dan hak untuk berkumpul harus diselidiki sepenuhnya. Aneksasi ilegal Krimea merupakan tindakan agresi. Dalam menghadapi agresi ini, masyarakat internasional harus berdiri bersama dalam mempertahankan nilai-nilai yang dianut dalam dunia internasional. Pemerintah Inggris menekankan agar Rusia mengakhiri pendudukannya dan mengembalikan Krimea ke Ukraina.<sup>99</sup>

Respon Inggris terhadap konflik tersebut dianggap serius. Inggris yang menjadi Dewan Keamanan PBB memiliki fokus terhadap pembangunan ekonomi dan hak asasi manusia sangat mengecam tindakan ini. Fokus tersebut dituangkan ke dalam berbagai sanksi yang dihasilkan dan diberikan ke Rusia. Sanksi tersebut seperti ketika ada sebuah barang yang ingin masuk ke Inggris mendapatkan penahanan, pembekuan asset Rusia yang diinvestasikan di London mengalami penahanan. Meskipun

---

<sup>99</sup> Hammond, Philip. 2016. *Foreign Secretary denounces Russia's continued illegal annexation of Crimea*. Dalam <https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-denounces-russias-continued-illegal-annexation-of-crimea> diakses pada 18 Februari 2018

tidak banyak tindakan yang diambil oleh Inggris di Dewan Keamanan, namun Pemerintah Inggris memberikan perhatian kepada situasi tersebut diluar keanggotaan PBB atau berdiri sendiri sebagai negara Eropa yang prihatin terhadap tindakan tersebut. Situasi tersebut merupakan situasi paling sulit di regional Eropa di abad ke 21 ini. Sehingga Pemerintah Inggris lebih banyak mengambil kebijakan langsung dari negara terhadap negara.

#### 4. Perancis

Perancis menggunakan hak veto dengan jumlah yang sangat sedikit. Terakhir kali secara diam-diam memveto sebuah rancangan pada tahun 1976 untuk memblokir sebuah resolusi mengenai masalah kemerdekaan Komoro yang dilakukan untuk menjaga pulau Mayotte sebagai wilayah luar negeri Prancis.<sup>100</sup> Perancis juga memveto bersama dengan Inggris sebuah resolusi yang menyerukan penghentian segera aksi militer oleh tentara Israel melawan Mesir pada tahun 1956 selama Krisis Suez.<sup>101</sup> Terakhir kali Perancis menggunakan hak veto adalah pada bulan Desember 1989 mengenai situasi di Panama.<sup>102</sup> Pada tahun 2003, ancaman veto resolusi Prancis tentang invasi yang akan terjadi ke Irak menyebabkan gesekan antara Prancis dan Amerika Serikat.

Jika ditelaah lebih dalam terkait dengan posisi Perancis di PBB, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, dan Perancis berada pada titik kritis dalam sejarah bersama. Uni Eropa, sejak Perjanjian Maastricht 1992 telah membuat kemajuan yang sangat baik menuju relevansi nyata di bidang politik, ekonomi, dan

---

<sup>100</sup> UN. 1976. *draft text number S/11967*. Dalam <https://www.globalpolicy.org/component/content/article/102/40069.html> diakses pada 18 Februari 2018

<sup>101</sup> *Ibid.* UN. 1956. *draft text number S/3671/Rev.1 Second Part*

<sup>102</sup> *Ibid.* UN. 1989. *drat text number S/21048*

keamanan. Berfungsi seperti negara *quasi-nation*, Uni Eropa berada di antara entitas politik paling kuat di dunia. Namun, kurangnya representasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengurangi efisiensi kedua organisasi tersebut. Sebuah substitusi tunggal di dalam Dewan Keamanan dapat memperbaiki masalah ini tanpa membuka peluang untuk melakukan perubahan struktural yang radikal. Mengapa hal tersebut bisa terjadi karena ada anggapan bahwa kursi Perancis di Dewan Keamanan harus menjadi kursi Uni Eropa.<sup>103</sup>

Diskusi yang sedang berlangsung untuk merevisi susunan Dewan Keamanan PBB yang terutama didorong oleh kekuatan dunia baru seperti India dan Brazil. Kedua negara tersebut merasa Dewan tersebut gagal untuk secara memadai mencerminkan dinamika dunia saat ini. Memang ada sebuah prosedur untuk perubahan semacam itu, seperti saat China menggantikan Taiwan pada tahun 1971, dan Rusia menggantikan Uni Soviet yang sudah tidak berfungsi pada tahun 1991. Kini adalah saat untuk menempatkan Uni Eropa di Dewan Keamanan karena kekuatan konstitusionalnya diperkuat dengan pelaksanaan undang-undang pada Perjanjian Lisbon tahun 2008.

Dengan lebih dari 500 juta warga negara, Uni Eropa menjalankan otoritas perjanjian yang signifikan untuk anggota regionalnya, mengembangkan kebijakan pertahanan umum Eropa, dan menghasilkan hampir 30 persen dari output ekonomi dunia. Berdasarkan Perjanjian Uni Eropa, negara-negara anggota Dewan Keamanan, Inggris dan Prancis, bersama dengan anggota manapun

---

<sup>103</sup> Commander Denny, Rick. 2010. *There is a Seat on the UN Security Council for the European Union – The French Seat*. Dalam <https://www.globalpolicy.org/security-council/security-council-reform/49995-there-is-a-seat-on-the-un-security-council-for-the-european-union-the-french-seat.html> diakses pada 18 Februari 2018

yang mengadakan tur dua tahun di Dewan tersebut harus menjaga kehormatan agar anggota Uni Eropa lainnya dapat memberikan informasi tentang tindakan Dewan Keamanan dan memastikan posisi Uni Eropa dijunjung tinggi, asalkan tidak bertentangan dengan posisi bangsa tersebut.<sup>104</sup>

Dalam hal perdamaian internasional, Perancis sepenuhnya mendukung operasi penjaga perdamaian PBB. Perancis adalah negara kedua yang selalu memberikan kontribusi dalam lima anggota tetap Dewan Keamanan, dengan 940 “*Blue Helmet*” ditempatkan di darat dalam 8 operasi penjaga perdamaian. Perancis terutama hadir dalam operasi PBB ketika misi UNIFIL (Lebanon), MINUSCA (CAR) dan MINUSMA (Mali). Perancis juga mendukung formasi setiap tahun lebih dari 25.000 tentara di 11 negara benua Afrika. Selain kontribusi langsung, negara ini juga hadir di lapangan dengan kekuatan resmi PBB dan bukan hanya tentara resmi dari militer Perancis. Untuk menjaga perdamaian dunia tetap stabil, Perancis adalah satu-satunya negara anggota PBB yang menggunakan pasukan nasional untuk mendukung operasi penjaga perdamaian. Di Mali, operasi Barkhane mendukung pasukan Afrika dan MINUSMA untuk memerangi terorisme jihad di wilayah tersebut. Hingga tahun 2016, operasi Prancis Sangaris mendukung MINUSCA di Republik Afrika Tengah. Perancis juga berkontribusi secara finansial terhadap operasi Afrika, seperti *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission* yang berperang melawan Boko Haram atau Pasukan Gabungan G5 Sahel. Perancis hadir dalam sepuluh dari lima belas operasi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini termasuk Afghanistan dan Lebanon, dan telah mengambil peran

---

<sup>104</sup> Denny, Norman R. 2010. *A Union on the UN: should France keep its Security Council seat?* . Dalam <http://www.freepatentsonline.com/article/Harvard-International-Review/240918450.html> diakses pada 19 Februari 2018

utama dalam bidang perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata.<sup>105</sup>

Perancis juga memainkan peran kunci dalam hal perlucutan senjata. Pemerintah Perancis telah bekerja untuk penjabaran berbagai perjanjian dan sangat terlibat dalam tindakan untuk memberlakukan rezim non-proliferasi. Itulah sebabnya Perancis mendukung penerapan CTBT (*Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*) dan meminta semua negara untuk meratifikasinya. Hal ini terutama terkait dengan pengembangan program nuklir dan balistik di Korea Utara. Perancis bersama dengan mitra Dewan Keamanannya memberikan suara untuk memilih sanksi terakhir yang diadopsi terhadap Korea Utara.<sup>106</sup>

Berkenaan dengan lingkungan dan perubahan iklim, tindakan yang diambil Prancis adalah bagian dari upaya jangka panjang, sejak deklarasi Rio pada tahun 1992 dan Protokol Kyoto pada tahun 1997. Baru-baru ini Agenda 2030 diadopsi pada tahun 2015, membentuk 17 SDG's dan yang didukung sepenuhnya oleh Perancis. Sehingga pada tingkat nasional, Perancis memutuskan untuk meningkatkan dana ke Badan Pembangunan Perancis (AFD) dengan 4 miliar Euro sampai 2020.<sup>107</sup> Pendekatan komprehensif ini mencakup semua masalah pembangunan yang menghubungkan kemiskinan dan pelestarian planet

---

<sup>105</sup> Information about the UN Offices, Model UN's & Human Rights Organizations. *French and The United Nations*. Dalam <http://www.ieeehtn.org/france.html> diakses pada 19 Februari 2018

<sup>106</sup> Permanent mission of France to the United Nations in New York. 2017. *France's role at the United Nations*. Dalam <https://onu.delegfrance.org/France-s-role-at-the-United-Nations-10352> diakses pada 19 Februari 2018

<sup>107</sup> Permanent mission of France to the United Nations in New York. 2017. *The 2030 Agenda for sustainable development*. Dalam <https://onu.delegfrance.org/The-2030-Agenda-for-sustainable-development> diakses pada 19 Februari 2018

secara lebih spesifik. Finalisasi dan diadopsi selama COP21 yang diselenggarakan oleh Perancis pada bulan Desember 2015 dan *Paris Agreement* mulai berlaku pada tahun 2016. Dengan persetujuan ini, negara-negara berkomitmen untuk mengemukakan strategi pembangunan jangka panjang dengan gas rumah kaca yang rendah. Ini adalah kesepakatan universal pertama yang diterapkan untuk memerangi perubahan iklim. Dengan ancaman terhadap lingkungan yang semakin mempengaruhi kelangsungan hidup umat manusia dan planet, maka sangat mendesak bagi negara di dunia untuk bertindak dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu Perancis juga mendukung penerapan *Global Pact for the Environment* agar dapat menyelaraskan semua hak terhadap lingkungan<sup>108</sup>.

Hak asasi manusia merupakan fokus bagi semua negara, Perancis salah satunya mempunyai prinsip yang sangat lekat pada Republik Perancis dan kebijakan luar negerinya. Perancis secara aktif berkomitmen untuk menegakkan standar tertinggi hak-hak ini. Perancis memainkan peran utama, terutama di dalam Dewan Hak Asasi Manusia dan Dewan Keamanan. Perancis terutama terlibat dalam perang melawan perekrutan tentara anak, penghilangan paksa atau pengasingan, penghormatan terhadap hak perempuan, dan perlindungan jurnalis. Hal tersebut didasari atas inisiatif berbagai resolusi dan konvensi. Perancis juga sepenuhnya dimobilisasi dalam perjuangan untuk menghapuskan hukuman mati. Di New York, ini mempromosikan penerapan resolusi Majelis Umum yang menyerukan pembentukan moratorium universal atas hukuman mati. Akhirnya, Perancis

---

<sup>108</sup>Permanent mission of France to the United Nations in New York. 2017. *The Global Pact for the Environment*. Dalam <https://onu.delegfrance.org/The-Global-Pact-for-the-Environnement> diakses pada 19 Februari 2018

mendukung perang melawan impunitas untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut. Pemerintah Perancis juga berkontribusi pada pembentukan *International Criminal Court* yang merupakan salah satu negara pertama yang meratifikasi undang-undang tersebut.<sup>109</sup>

Di dalam Dewan Keamanan PBB, Presiden Prancis François Hollande bereaksi tidak setuju ketika mengetahui bahwa Moskow menandatangani sebuah perjanjian yang membuat Krimea menjadi bagian dari Rusia, serta menuntut sebuah respon yang kuat dari Uni Eropa. Menteri luar negeri Prancis sebelumnya mengancam akan membatalkan kesepakatan untuk menjual dua kapal perang ke Rusia sebagai respon terhadap tindakan ekstrem dari kebijakan Putin. Presiden Prancis François Hollande mengatakan bahwa dia mengecam Moskow atas sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin secara sepihak yang menjadikan Krimea sebagai bagian dari Rusia. Pernyataan ekstrem yang dikeluarkan oleh Putin kepada anggota parlemen di parlemen Rusia bahwa Krimea adalah bagian integral dari Rusia merupakan tindakan yang ditanggapi sangat negatif oleh hampir seluruh Uni Eropa.

Dalam sebuah pernyataan dari Istana Elysée, Hollande mengatakan bahwa aneksasi tersebut sudah jelas melawan hukum Ukraina dan hukum internasional. Presiden Prancis tersebut juga mengatakan bahwa Prancis tidak mengetahui hasil referendum yang statusnya jelas ilegal. Hollande meminta tanggapan Uni Eropa yang serius dan terkoordinasi terhadap aneksasi Krimea di Rusia yang

---

<sup>109</sup> Permanent mission of France to the United Nations in New York. 2017. *France's role at the United Nations*. Dalam <https://onu.delegfrance.org/France-s-role-at-the-United-Nations-10352> diakses pada 19 Februari 2018

menurutnya tidak diketahui oleh Perancis.<sup>110</sup> Gérard Araud yang merupakan perwakilan dari Perancis mengatakan bahwa tindakan veto yang dilakukan oleh Rusia adalah sama saja dengan memveto piagam PBB secara keseluruhan.<sup>111</sup> Sebelumnya Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengatakan bahwa dia dapat menghalangi kesepakatan kontroversial untuk menjual dua kapal perang Mistral ke Rusia sebagai akibat sikap Vladimir Putin terhadap Krimea dan krisis Ukraina.<sup>112</sup>

Untuk menghindari kelumpuhan Dewan Keamanan, Presiden Republik Perancis, François Hollande mengusulkan pada tahun 2013 bahwa anggota tetap secara sukarela dan kolektif berjanji untuk tidak menggunakan hak veto jika terjadi kekalahan massal yang diakui. Reformasi ini tidak akan melibatkan amandemen Piagam PBB. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengambil alih Dewan Keamanan dalam kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang skala besar. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada tindakan semena-mena dalam penyelesaian sebuah kasus. Reformasi tersebut didukung oleh Perancis untuk menghindari kecacatan fungsi dari Dewan Keamanan itu sendiri.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup> Expatica. 2014. *France's Hollande urges 'strong' EU response to Crimea grab*. Dalam [https://www.expatica.com/fr/news/country-news/Frances-Hollande-urges-strong-EU-response-to-Crimea-grab\\_399786.html](https://www.expatica.com/fr/news/country-news/Frances-Hollande-urges-strong-EU-response-to-Crimea-grab_399786.html) diakses pada 18 Februari 2018

<sup>111</sup> UN News. 2014. *UN Security Council action on Crimea referendum blocked*. Dalam <https://news.un.org/en/story/2014/03/464002-un-security-council-action-crimea-referendum-blocked> diakses pada 19 Februari 2018

<sup>112</sup> McPartland, Ben. 2014. *Crimea: Hollande wants firm EU retort to Russia*. Dalam <https://www.thelocal.fr/20140318/france-could-cancel-warship-deal-with-russia> diakses pada 19 Februari 2018

<sup>113</sup> Permanent mission of France to the United Nations in New York. 2017. *France and the UN Reform*. Dalam

Lalu di era Presiden Macron, sebagai bentuk respon terhadap konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Prancis tidak akan menerima aneksasi Rusia di semenanjung Krimea. Setelah bertemu dengan Presiden Ukraina Petro Poroshenko di Paris, Macron mengatakan bahwa Prancis berkomitmen terhadap kedaulatan Ukraina dengan batas-batas yang diakui. Macron mengatakan bahwa dia menyampaikan kepada Poroshenko bahwa Prancis menginginkan pelaksanaan Perjanjian Minsk pada Februari 2015 untuk mengakhiri kekerasan antara pasukan pemerintah dan separatist pro-Rusia di Ukraina timur. Poroshenko mengatakan bahwa dia mengharapkan perundingan "*Normandy Format*" berikutnya antara Prancis, Jerman, Ukraina dan Rusia. Poroshenko menambahkan bahwa dia lebih optimis mengenai masalah tersebut setelah pertemuannya dengan Macron.<sup>114</sup> Gérard Araud yang merupakan perwakilan dari Prancis untuk Dewan Keamanan menyindir bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Rusia seolah seperti "memveto Piagam PBB" dengan mengambil tindakan untuk memveto resolusi untuk penyelesaian krisis di Ukraina.<sup>115</sup>

## 5. China

Pada tahun 1989 Deng Xiaoping menetapkan bahwa China harus mengadopsi sikap rendah hati dalam urusan internasional. Seperti yang disampaikan olehnya

---

<https://onu.delegfrance.org/France-and-UN-Reform> diakses pada 19 Februari 2018

<sup>114</sup> Ugurlu, Sibel. 2017. *France not to accept Russia's annexation of Crimea. Dalam* <http://aa.com.tr/en/europe/france-not-to-accept-russias-annexation-of-crimea/849393> diakses pada 19 Februari 2018

<sup>115</sup> UN News. 2014. *UN Security Council action on Crimea referendum blocked. Dalam* <https://news.un.org/en/story/2014/03/464002-un-security-council-action-crimea-referendum-blocked> diakses pada 19 Februari 2018

bahwa China harus mengamati dengan dingin, mengamankan posisi, mengatasi sebuah permasalahan dengan tenang, menyembunyikan posisi dan tantangan menunggu waktu mereka, tetap low profile, tidak pernah memimpin, dan memberi sebuah kontribusi.<sup>116</sup> China memusatkan perhatian kebijakan luar negeri secara eksklusif atas tujuan ekonomi. Seorang akademisi Rusia telah mengamati bahwa ada sebuah konsekuensi atas tindakan mereka. Konsekuensinya adalah ketergantungan terbesar China terhadap interaksi dengan Rusia sebagai eksponen utama kepentingan dunia non-Barat dalam isu global. Jadi Cina umumnya mendukung prakarsa Rusia.<sup>117</sup>

Salah satu interpretasi dari praktik diplomasi China karena negara tersebut secara bertahap berusaha untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam organisasi internasional. Hal tersebut memungkinkan untuk wakil-wakilnya mengamati dengan hati-hati cara-cara bagaimana organisasi ini beroperasi sehingga mereka bisa menyesuaikan diri. Alih-alih menantang tatanan internasional yang ada, China justru berusaha untuk belajar bagaimana bekerja di dalamnya dan bagaimana membuat organisasi tersebut agar dapat bekerja.<sup>118</sup> Pemerintah China telah lebih peduli untuk meyakinkan pemerintah di seluruh dunia bahwa 'kenaikan' China adalah dengan damai dan bukan ancaman bagi siapapun. Adapun yang pernah dilakukan adalah diplomasi China di Dewan Keamanan PBB mengenai isu-isu tentang Irak antara tahun 1991 dan 2003. Respon China sama seperti Rusia terhadap invasi Irak pada tahun 2003, mereka menunjukkan bahwa selama

---

<sup>116</sup> Chen, D. and Wang, J. 2011. *Lying Low no More? China's New Thinking on the Tao Guang Yang Hui Strategy*. China: an International Journal, vol.9, no.2. hal 195-216.

<sup>117</sup> ashin, V.B. *Vyiti iz teni*. op.cit.

<sup>118</sup> Morpeth, S. 2000. *China as a Permanent Member of the Security Council*. Security. hal.151-66.

dekade sebelumnya China semakin berlatih multilateralisme dan keseimbangan kekuasaan, mengakomodir dan melindungi sebuah nilai. Untuk menciptakan pada keseimbangan China tidak cenderung memilih perilaku obstruktif di Dewan Keamanan<sup>119</sup>. Adapun tanggapan lain seperti yang dikatakan oleh seorang komentator Rusia, China terus memposisikan diri mereka setengah langkah di belakang, membiarkan Rusia untuk memimpin. Menurutnya, pejabat China ada di sana dan lebih gugup daripada orang Rusia yang menentang Amerika Serikat.<sup>120</sup>

Ini adalah fakta yang mengejutkan, mengingat bahwa paling tidak diawal konfrontasi selama satu dekade antara Barat dan rezim Saddam Hussein di Irak, China sendiri merupakan sasaran sanksi Barat setelah pembantaian pemrotes di sekitar Lapangan Tiananmen pada tahun 1989. Xiao setuju bahwa dalam keterlibatannya selama satu dekade di diplomasi internasional atas Irak, China mencoba memuaskan rekan-rekan Barat dan juga menenangkan kondisi domestik<sup>121</sup>.

Sampai batas tertentu perbedaan antara Rusia dan China ini dalam menghadapi Amerika Serikat telah dimulai baru-baru ini. Sebagian ini karena prestise Barat dan model pembangunannya telah terhalang oleh krisis keuangan global dan akibat dari tindakan yang telah diambil selama

---

<sup>119</sup> Yang, S.X. 2012. *China in the UN Security Council Decision-Making on Iraq: Conflicting Understandings*. Competing Preferences. Routledge: London. hal 100.

<sup>120</sup> Galenovich, Iu.M. and Rossiia, Kitai. 2006. *Amerika: ot sopernichestva k garmonii interesov?, Russkaia Panorama*. Moscow. Hal 270 dan 567.

<sup>121</sup> Yang, S.X. 2012. *China in the UN Security Council Decision-Making on Iraq: Conflicting Understandings*. Competing Preferences. Routledge: London. hal 188.

ini. Hal ini mendorong para elite China untuk lebih percaya diri. Pemimpin China tidak merasa terancam oleh Barat, bahkan kalau harus untuk melawan Amerika Serikat. Sebagian juga mencerminkan perubahan generasi pemimpin China. Cina di bawah Xi Jinping telah menjadi lebih kuat dalam kebijakan luar negerinya di Pasifik dalam mengejar klaim teritorial China di Laut Cina Selatan dan Timur, meskipun beberapa tetangganya sudah mulai melakukan tindakan untuk melindungi posisi mereka dengan melihat perlindungan dari Amerika Serikat. Lalu sikap China akhir-akhir ini sudah menjadi sedikit lebih asertif. Pernyataan resmi telah dimodifikasi dari permintaan Deng untuk tetap *low profile*, menunjukkan tindakan tersebut China sekarang harus secara proaktif berusaha berbuat lebih banyak.<sup>122</sup>

Adapun prioritas utama diplomasi China di PBB, Menurut Yang, Cina memiliki empat tujuan utama di sana, diantaranya:

1. Melindungi kedaulatan, otonomi dan independensi pengambilan keputusan di sana;
2. Menjaga keseimbangan geostrategis dan keamanan nasional;
3. Mengolah suatu hal yang menguntungkan citra internasional dan status sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab dan memiliki kekuatan yang besar;

---

<sup>122</sup>European Parliament. Directorate-General For External Policies Of The Union Directorate B Policy Department. 2013. *The Positions Of Russia And China At The UN Security Council In The Light Of Recent Crises*. Dalam <http://www.europarl.europa.eu> pada 19 Februari 2018

4. Mempromosikan kepentingan ekonomi dan politik China.<sup>123</sup>

Daftar ini akan berlaku sama baiknya untuk Rusia dan memang sebagian besar negara bagian di PBB. Odgaard telah menyediakan daftar prinsip strategi China yang diwakili dengan empat unsur:

1. Ketaatan teguh pada kedaulatan absolut dan memprioritaskan dialog mengenai penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan konflik;
2. Keyakinan bahwa operasi Chap. VII harus memiliki persetujuan pemerintah untuk siapa mereka diarahkan, kecuali jika agensi PBB dapat menunjukkan bukti pelanggaran peraturan PBB yang jelas;
3. Mendukung upaya pemerintah untuk mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi, dengan stabilitas yang diprioritaskan atas hak asasi manusia;
4. Menegakkan dan memperkuat peraturan perundangan dalam hubungan internasional.<sup>124</sup>

Kedua daftar ini menunjukkan bahwa perhatian paling mendasar bagi China dan Rusia di PBB adalah prinsip pertama yaitu menjaga kedaulatan negara yang ada. Bagi mereka ini adalah prinsip dasar diplomasi di dunia modern. Untuk China ada perhatian khusus yang mutlak menyangkut isu pengakuan rezim nasionalis di Taiwan

---

<sup>123</sup> Yang, S.X. 2012. *China in the UN Security Council Decision-Making on Iraq: Conflicting Understandings*. Competing Preferences. Routledge: London. hal 61

<sup>124</sup> Odgaard, L. 2012. *China and Coexistence: Beijing's National Security Strategy for the Twenty-First Century*. Woodrow Wilson Center Press / Johns Hopkins University Press: Washington. hal.129-30.

sebagai wilayah pemerintah China. Sejak 1971 ini telah menjadi penyebab umum dari China atas pengambilan tindakan veto. Pada tahun 1996, RRC memveto perpanjangan misi pemeliharaan perdamaian PBB ke Haiti dan pada tahun 1999 hal itu sama untuk kasus di Republik Macedonia karena kedua pemerintah tersebut mengakui Taiwan. Efek dari veto ini adalah membuat mereka untuk berganti pihak.

Namun secara umum isu menghormati kedaulatan ini membantu menjelaskan mengapa China menentang perang Teluk pada tahun 1991 untuk mengusir tentara Irak dari Kuwait. Hal itu didukung karena Irak pertama kali menggunakan kekerasan untuk mengubah sebuah perbatasan. Prinsip ini membuat Rusia dan China enggan mendukung solusi diplomasi untuk krisis keamanan internasional yang melibatkan keterlibatan eksternal dalam urusan internal sebuah negara tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa mereka sangat mewaspadaai konsep baru dari hukum internasional, seperti tanggung jawab untuk melindungi yang melegitimasi kedaulatan utama negara bahkan demi menghindari atau mengakhiri bencana kemanusiaan berskala besar, tidak terkecuali karena bisa mendorong separatisme. Mereka sadar akan bahaya yang telah lalu digunakan untuk melawan mereka di daerah bermasalah di wilayah mereka sendiri, seperti Chechnya, Tibet dan Xinjiang. Untuk China isu asas ini sebanding dengan kerjasama diplomatiknya dengan Rusia pada tahun 2008 selama perang dengan Georgia dan deklarasi kemerdekaan Rusia berikutnya untuk Abkhazia dan Ossetia Selatan, yang belum diakui China. Harus diingat bahwa China hanya menyetujui masuknya referensi positif tentang 'tanggung jawab untuk melindungi' dalam Dokumen Hasil KTT Dunia 2005 ketika disepakati bahwa hal itu hanya bisa diterapkan dengan persetujuan Dewan Keamanan, di lain pihak kata-kata di mana ia akan memiliki hak veto potensial. Pada saat yang sama, meskipun, hal itu

mengakui kekuatan kebutuhan masyarakat internasional untuk dapat melakukan intervensi untuk mencegah bencana kemanusiaan.<sup>125</sup>

Pengalaman China untuk dikritik karena penolakannya terhadap penghukuman terhadap pelanggaran di Darfur, Sudan Selatan membuatnya lebih sensitif terhadap kerusakan reputasi karena bersikeras untuk tidak mengganggu sama sekali. Namun baik China maupun Rusia tetap menekankan perlunya memusatkan perhatian pada intervensi untuk memperkuat kapasitas negara untuk mencegah bencana pengungsi dan kebutuhan akan persetujuan pemerintah tuan rumah. Hal tersebut dilakukan daripada mencoba untuk membawa perubahan rezim. Jika pemerintah yang layak tetap berada di tempat, Rusia dan China lebih memilih untuk menyusun intervensi eksternal di sekitarnya, namun tetap dengan persetujuan dari pihak yang bertikai.

Pada saat yang sama, China sudah tidak lagi memegang dukungan mutlak untuk prinsip kedaulatan dalam segala situasi, seperti yang terjadi dua dekade yang lalu. Integrasi China yang berkembang ke dalam ekonomi dunia, berkembangnya globalisasi yang sangat pesat dan keterlibatannya yang semakin aktif dalam pemerintahan global di Dewan Keamanan PBB telah membawa pulang kepadanya dilema untuk mendamaikan tata kelola global yang dapat diterima dengan kedaulatan nasional.<sup>126</sup> Wuthnow mengutip wawancara dengan diplomat senior China yang menerima bahwa kedaulatan Negara Pariah

---

<sup>125</sup> Garwood-Gowers, A.. 2012. *China and the "Responsibility to Protect": The Implications of the Libyan Intervention*. Asian Journal of International Law vol.2. hal 381.

<sup>126</sup> Carlson, Allen. 2004. *Helping to keep the Peace (Albeit Reluctantly): China's Recent Stance on Sovereignty and Multilateral Intervention*. Pacific Affairs 77. hal.9-27.

yang menantang stabilitas regional dan nonproliferasi nuklir tidak dapat diberikan penghormatan mutlak. Non-proliferasi nuklir merupakan perhatian utama China. China tampaknya menyadari bahwa perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah akan mengganggu kestabilan seluruh wilayah.<sup>127</sup> Jadi, seperti yang telah ditunjukkan di atas, Cina dan Rusia dalam beberapa tahun terakhir memilih untuk memveto deklarasi PBB, dan bahkan kadang-kadang sebuah resolusi yang membuat PBB untuk campur tangan dalam urusan internal negara demi menyelesaikan tantangan internasional menuju perdamaian dan keamanan.

Namun demikian, satu perpanjangan dari prinsip ini adalah bahwa China masih sangat enggan untuk menyetujui penggunaan kekuatan untuk menerapkan solusi menjaga perdamaian pada partai-partai yang berada dalam konflik. Pemerintah China percaya bahwa pengenaan sanksi operasi pemeliharaan perdamaian secara prematur dapat menyebabkan tuduhan terhadap atas keberpihakan, bahkan ketika penjaga perdamaian mengklaim bertindak atas nama masyarakat internasional melalui PBB. Kecurigaan ini pada waktunya dapat memperpanjang konflik, menyebabkan korban lebih lanjut, termasuk di antara penjaga perdamaian. Jadi China, lebih dari Rusia meski kadang-kadang Rusia mengadopsi posisi ini juga, berusaha untuk menampilkan dirinya sebagai mediator dalam konflik internasional. Dengan implikasinya sebagai mediator yang dipercaya, seharusnya tidak muncul untuk memihak jika dipercaya oleh protagonis. Perlu dikui bahwa peran ini yang lebih mudah diadopsi China di tahun-tahun sebelumnya, ketika China merupakan pendatang baru di panggung internasional dan memiliki komitmen lebih sedikit untuk membangun mitra strategis. Tapi tetap posisi awal bagi China saat ini dihadapkan pada tantangan baru

---

<sup>127</sup> Wuthnow, Joel. 2013. *Chinese Diplomacy and the UN Security Council: Beyond the Veto*. Routledge. hal 87-88, 117, 174

bagi keamanan internasional untuk diselesaikan. China juga membenarkan posisi ini dengan mengklaim ingin mempertahankan status Dewan Keamanan sebagai badan yang tidak memihak. Mewakili perspektif yang berbeda mengenai peran PBB dalam menegakkan pemerintahan global, karena tidak berusaha keras untuk memimpin dalam upaya untuk menengahi. Hal ini sering membuat China terpisah dari Amerika Serikat, Inggris dan Perancis.

Ada sebuah paradoks tentang kecenderungan baru-baru ini dalam sikap China untuk menghadapi tantangan terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang merupakan kriteria intervensi Dewan Keamanan di bawah Bab VII Piagam PBB. China memang ingin melihat peran Dewan Keamanan ditingkatkan. Namun pada saat bersamaan pemerintah China telah beringsut menuju melibatkan organisasi regional seperti Uni Afrika dalam keputusan mengenai apakah situasi tertentu benar-benar mewakili ancaman terhadap perdamaian internasional dan keamanan internasional, atau setidaknya untuk melegitimasi mereka. Tanpa pembuktian itu, lebih enggan memberikan kekuatan Dewan Keamanan untuk bertindak kecuali dalam keadaan dimana ancamannya paling mencolok. Odgaard berkomentar bahwa ini sesuai dengan keinginan China untuk mempertaruhkan kesamaan dengan negara-negara di luar wilayah Barat.<sup>128</sup> Ini membantu menjelaskan mengapa China dan Rusia siap untuk berpantang pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 yang memberi wewenang intervensi NATO di Libya pada tahun 2011 karena mendapat dukungan dari Liga Arab dan Uni Afrika, hal tersebut disepakati oleh duta besar China secara eksplisit. Di sisi lain mereka memveto sebuah

---

<sup>128</sup> Odgaard, L. 2012. *China and Coexistence: Beijing's National Security Strategy for the Twenty-First Century*. Woodrow Wilson Center Press / Johns Hopkins University Press: Washington. hal.148-149

rancangan resolusi pada bulan Juli 2012 di Suriah, di mana Liga Arab mengirim pengamat dan mencoba menengahi antara partai-partai yang bertikai, namun rezim Syria menolak untuk menerima intervensi dari luar.

Tapi satu elemen penting dalam citra diri China sebagai aktor internasional tidak berubah, terlepas dari keberhasilan ekonomi dramatis dalam 30 tahun terakhir. Inilah yang membedakan China dari Rusia. China menganggap dirinya sebagai satu-satunya negara bagian P5 yang biasanya mendukung kekhawatiran negara-negara berkembang, sejak tahun 1992 telah memiliki status pengamat pada Gerakan Non-Blok dan merupakan satu-satunya negara bagian P5 yang hadir. Pada saat yang sama, menurut Morphet, secara pandangan lama hal tersebut menyeimbangkan kekhawatiran dengan memperhatikan statusnya sebagai Anggota Tetap.<sup>129</sup>

Setelah pengusiran Republik China dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1971, veto pertama yang dikeluarkan oleh Republik Rakyat Cina, dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 1972 atas pengakuan Bangladesh kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada bulan Mei 2014, Republik Rakyat Cina telah menggunakan veto sebanyak sembilan kali. China lebih sering abstain daripada menggunakan tindakan veto ketika tidak bersinggungan langsung dengan kepentingan China.

Untuk menanggapi konflik yang terjadi antara Rusia-Ukraina terhadap aneksasi di wilayah Semenanjung

---

<sup>129</sup>European Parliament. Directorate-General For External Policies Of The Union Directorate B Policy Department. 2013. *The Positions Of Russia And China At The UN Security Council In The Light Of Recent Crises*. Dalam <http://www.europarl.europa.eu> pada 19 Februari 2018

Krimea, Pemerintah China secara tradisional merupakan sekutu Rusia di Dewan Keamanan. Sehingga sependapat dengan kebijakan Rusia untuk melakukan aneksasi. Namun sesuai dengan prinsip Rusia, ketika tidak berkenaan langsung dengan kepentingan China maka keputusan yang diambil adalah abstain.<sup>130</sup> Tidak ada yang menduga bahwa resolusi tersebut tidak berhasil. Para diplomat Barat berharap China tidak mau bergabung dengan Rusia, yang mana akan mendorong Moskow ke sudut yang tidak nyaman. Tindakan tersebut disusun dengan hati-hati untuk meyakinkan China agar tidak melakukan abstain seperti usaha yang dilakukan oleh duta besar Inggris, Mark Lyall Grant. China tidak ingin dipandang sebagai lawan mitra strategisnya Rusia. Hal tersebut tidak ingin dilihat sebagai pendukung pemisahan Krimea, yang dapat mendorong pemungutan suara untuk kemerdekaan bagi Tibet atau Taiwan. Liu Jieyi, Perwakilan Tetap China ke PBB, mengatakan setelah pemungutan suara bahwa Beijing mencari solusi yang seimbang terhadap konflik tersebut dalam kerangka hukum dan ketertiban. Dia menyerukan pembentukan kelompok koordinasi, paket dukungan untuk Ukraina, dan juga meminta negara-negara untuk menahan diri dari tindakan yang selanjutnya dapat meningkatkan konflik.<sup>131</sup> China selalu menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara. Penjelasan tersebut disampaikan guna menjelaskan abstainnya China dalam pemungutan suara. Itu juga dilakukan untuk memberi pengertian ke Barat bahwa tindakan yang diambil oleh

---

<sup>130</sup> Sengupta, Somini. 2014. *Russia Vetoes U.N. Resolution on Crimea*. Dalam <https://www.nytimes.com/2014/03/16/world/europe/russia-vetoes-un-resolution-on-crimea.html> diakses pada 18 februari 2018

<sup>131</sup> UN News. 2014. *UN Security Council action on Crimea referendum blocked*. Dalam <https://news.un.org/en/story/2014/03/464002-un-security-council-action-crimea-referendum-blocked> diakses pada 19 Februari 2018

China sangat rasional. Pada saat yang sama kita melihat adanya campur tangan asing juga merupakan alasan penting yang menyebabkan terjadinya bentrokan dengan kekerasan di wilayah Ukraina.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Sengupta, Somini. 2014. *Russia Vetoes U.N. Resolution on Crimea*. Dalam <https://www.nytimes.com/2014/03/16/world/europe/russia-vetoes-un-resolution-on-crimea.html> diakses pada 18 februari 2018